

KABUPAPATEN TEMANGGUNG DAN KOTA MAGELANG

Jajaki Kerja Sama Bidang Pariwisata

TEMANGGUNG (KR) - Temanggung dan Kota Magelang melakukan peninjauan kerja sama di bidang pariwisata, untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan.

Untuk itu, Bupati Temanggung Al Khadziq dan Wali Kota Magelang M Nur Aziz mengadakan pertemuan di Pendapa Jenar Kantor Bupati Temanggung, Selasa (23/3). Pada pertemuan itu masing-masing kepala daerah didampingi sejumlah pejabat utama.

Walikota Magelang M Nur Aziz mengatakan silaturahmi dilakukan ke sejumlah da-

erah setempat, termasuk di Temanggung, sebagai peninjauan kerja sama di berbagai bidang, termasuk pariwisata. "Sebenarnya banyak yang bisa dikerja samakan. Kami ingin kerja sama bidang pariwisata karena kota kami adalah Kpta Jasa, yang mengandalkan pelayanan," ungkapnya.

Menurut Walikota, Pemkot Magelang saat ini sedang menata tempat-tempat

wisata yang ada dan ke depan akan menjalin kerjasama antardaerah. Pemkot Magelang juga sedang mencari bentuk transportasi yang paling efisien untuk menghubungkan wilayah eks-Karesidenan Kedu.

"Kota Magelang dan Temanggung itu dekat sekali, tetapi kadangkala kesulitan transportasi. Mudah-mudahan ke depan kami bisa membuat cara supaya bisa saling belajar," tandasnya.

Bupati Temanggung Al Khadziq mengungkapkan pihaknya akan mempelajari bagaimana Kota Magelang menata kota se-

hingga bisa lebih rapi. "Sebaliknya, Kota Magelang juga akan belajar bersama Temanggung tentang banyak hal. Sama-sama me-

ngelola masyarakat yang hampir sama karakternya. Kami siap untuk menjalin kerja sama," tegasnya. (Osy)



KR-Zaini Arrosyid

Penyerahan cinderamata Walikota Magelang dan Bupati Temanggung.

Karanganyar Siap Tilang Elektronik

KARANGANYAR (KR) - Satlantas Polres Karanganyar mengakui kurang maksimal memantau pelanggaran lalu lintas dengan hanya pemasangan satu titik Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Karena itu, Satlantas menajajaki kerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dis-hub).

"Meskipun sudah terpasang ETLE di persimpangan Nglano, kapasitasnya masih kurang maksi-

mal. Tenaga operator juga minim, sehingga penilangannya belum terkover semua yang terpantau kamera CCTV," kata Kasatlantas Polres Karanganyar AKP Suwarko usai launching ETLE Nasional di Mapolres setempat, Selasa (23/3).

Menurutnya, satu perangkat tilang elektronik itu sudah dipasang sejak 2020 lalu di simpang Nglano.

Satu lagi kamera perekam kecepatan kendaraan di Colomadu. Meskipun sempat terhenti operasionalnya, tak lama kemudian berlanjut.

"Sengaja tidak dipasang di jalur utama Jalan Lawu karena Dishub sudah banyak memasang di sana. Ke depan, titik pemasangan ETLE akan ditam-

bah secara bertahap, kerja sama Dishub," jelas AKP Suwarko.

Diungkapkan, aparat tetap berperan meski ETLE diterapkan. Bahkan aparat Polantas berpatroli di area yang tidak tercover ETLE, dengan menerapkan inovasi Polda Jateng berupa Kamera Portabel Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor (Kopek) yang diadopsi di wilayah Karanganyar.

Sejauh ini lima unit Kopek dipasang di helm Polantas bermotor. Satu lagi dipasang di mobil patroli lalu lintas.

Kapolres Karanganyar AKBP M Syafi Maula mengatakan ETLE bertujuan untuk membuat masyarakat tertib di jalan agar tidak membahayakan orang lain dan juga

diri sendiri. Cara ini juga untuk meminimalisasi pungli dari pertemuan antara petugas dengan masyarakat.

"Meski demikian, walau sudah menggunakan alat canggih itu, penindakan langsung dari petugas di jalan masih akan dilakukan, namun tetap mengacu tata penindakan terukur," jelasnya.

Jika kendaraan sudah berpindah ke orang lain, lanjut Kapolres, maka tugas pemilik pertama kendaraan itu yang harus memberitahukan ke pengendara terkait tilangnya.

"Jika nomor plat mobil ada di luar daerah, maka petugas akan berkoordinasi dengan daerah di mana plat nomor itu diterbitkan," tandas Kapolres. (Lim)



KR-Abdul Alim

Para perwira Polres Karanganyar memakai helm Kepek.

KPK Prioritaskan Pencegahan

SOLO (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan selalu mengingatkan kepala daerah untuk bergotong royong mencegah dan memberantas korupsi. Ini dimaksudkan agar kepala daerah tidak kepeleset masalah korupsi.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di sela sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan kepala daerah se-Solo Raya, Selasa (23/3) di Balaikota Solo.

Ia memberi gambaran, gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2017 memperoleh penghargaan *Bung Hatta Anti Corruption Award* semasa masih menjadi Bupati Bantaeng, namun kemudian terlibat kasus korupsi. Dia mengaku kaget ketika tokoh yang dikenal sebagai pemimpin dan buati yang bersih itu dibawa ke KPK atas dugaan kasus korupsi.

Menurut Marwata, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama semua elemen masyarakat, termasuk kepala daerah. Jika mengacu pada tugas KPK sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) KPK, tidak ada perubahan dibanding UU KPK sebelumnya. "Memang, ada perubahan skala prioritas tugas KPK melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi, baru disusul tugas-tugas berikutnya," jelasnya.

Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berkomitmen menumbuhkan tata kehidupan masyarakat yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari langkah penyelenggaraan *good governance* dan *clean government*.

"Pemkot Solo sangat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme," tandasnya. (Hut)

DI KABUPATEN PATI

Angka Pengangguran Meningkat

PATI (KR) - Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati, Pujo Winarno mengungkapkan, jumlah pengangguran selama pandemi Covid-19 di kabupaten setempat kenaikan. Pada tahun 2020 tercatat 30.244 orang.

Angka tersebut lebih banyak 5.932 orang (19,6 persen) dibanding tahun 2019 yakni 24.312 orang. Proporsi pengangguran tahun 2020 didominasi lulusan SMA (52,76 persen), kemudian SMP (17,07), SD (11,78), dan Perguruan Tinggi (18,39).

"Dampak pandemi Covid-2020, juga menekan angka kemiskinan yang terus merosot. Dari jumlah penduduk miskin yang semula 118 ribu (2019), ternyata menjadi 127 ribu jiwa atau bertambah 8 ribu. Dampak pandemi ini tidak hanya berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi nasional namun juga terasa di daerah. Selama pandemi, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Namun sektor pertanian dan manufaktur justru mengalami pertumbuhan positif," ungkap Pujo Winarno, Selasa (23/3). (Cuk)

HUKUM

DITEMUKAN DI WISMA SERMO

Identitas Mayat Perempuan Terungkap

WATES (KR) - Polisi berhasil mengungkap identitas mayat perempuan muda yang ditemukan tergeletak di emperan Wisma Sermo sisi selatan wilayah Pedukuhan Kedungtangkil Karanganyar Pengasih, Selasa (23/3) sore.

Kasubbag Humas Polres Kulonprogo, Iptu I Nengah Jeffry, Rabu (24/3) membenarkan pihaknya berhasil mengetahui identitas mayat dari hasil pemeriksaan petugas menggunakan alat pendeteksi identitas, mambis. Mayat perempuan muda ini diketahui bernama Desi Sri Diantari (22) yang beralamat di Pedukuhan Gadingan Wates.

"Terkait penemuan mayat ini apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, pihaknya belum bisa memastikan dan memberikan keterangan lebih lanjut. Petugas saat ini masih melakukan lidik," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan petugas medis tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Namun ditemukan beberapa bercak darah di daun telinga, punggung, telapak tangan dan leher. Guna mengetahui penyebab kematian, jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Yogya sekitar pukul 00.30 guna dilakukan tindak lanjut otopsi.

Saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari otopsi. Sebelumnya, mayat perempuan muda tanpa identitas ini ditemukan tergeletak di emperan Wisma Sermo sekitar pukul 16.30. Ditemukan pertama kali oleh seorang warga yang melintas di lokasi kejadian untuk merumpuk.

Sementara itu, warga dan petugas gabungan berhasil menemukan jasad dua

bocah yang dikabarkan hilang. Keduanya ditemukan di dalam kubangan galian pasir. Jenazah kedua korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman Desa Surajaya Pemalang.

Para korban yakni, Dimas (9) dan Helmi (8). Keduanya oleh petugas dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan visum dokter. Menurut petugas, hasil visum tidak ditemukan tanda kekerasan pada diri korban. "Kedua jasad korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman Desa setempat kemarin," ujar Sahroni, pamong Desa setempat.

Sebelumnya, kedua korban dikabarkan hilang di areal hutan jati, Minggu (21/3) lalu. Petugas dan warga pun kemudian melakukan pencarian di sekitar areal hutan jati. Namun setelah dua hari korban baru bisa ditemukan.

Kedua bocah malang itu ditemukan sudah tidak bernyawa oleh tim gabungan di kubangan air galian pasir. Kepala Desa Surajaya, Wasno mengatakan, jenazah dua bocah itu ditemukan sekitar pukul 16.15.

"Keduanya ditemukan di lokasi yang sama, yaitu di dalam kubangan air galian pasir, yang penuh air," ujar Warso.

Salah seorang relawan PMI Kabupaten Pemalang, Amir, menyebutkan ketinggian air bekas galian mencapai sekitar 1,5 meter. Saat pencarian, tim gabungan juga sempat menguras air dengan pompa. "Kemungkinan para korban bemin di dekat kubangan pasir itu dan mereka kecebur hingga tenggelam, tapi tidak Ada yang tahu hingga meninggal," tutur Amir. (M-4/Ryd)



KR-Dani Ardijanto

Petugas mengevakuasi mayat perempuan yang di Wisma Sermo.

MASA PENAHANAN DIPERPANJANG

Raja dan Ratu KAS Dicari Jaksa

PURWOREJO (KR) - Mahkamah Agung (MA) memutuskan memperpanjang masa penahanan selama 30 hari untuk Toto Santoso (43) dan Fanni Aminadia (42), dua terpidana yang dikenal sebagai Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat (KAS).

Tim intelijen Kejari Purworejo segera melakukan pencarian begitu surat perpanjangan masa penahanan yang asli diterima dari MA.

Humas PN Purworejo Syamsumar Hidayat, Selasa (23/3), mengungkapkan Toto dan Fanni saat ini sudah tidak ditahan di Rutan Kelas II B Purworejo.

Masa penahanan selama 110 hari dalam upaya hukum kasasi yang diajukan keduanya ke MA, habis pada 13 Maret 2021.

Pihak Rutan mengeluarkan keduanya karena tidak memiliki alasan lagi untuk melakukan penahanan.

Sesuai Pasal 28 (4) KUHP, apabila masa penahanan 110 hari selesai dan perkara belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Toto Santoso dan Fanni Aminadia keluar tahanan pada 15 Maret 2021.

Namun, MA kemudian kembali

memperpanjang masa penahanan selama 30 hari, terhitung mulai 14 Maret 2021 hingga 14 April 2021.

Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor 1665/2021/s.488.-Tah. Sus/PP/2021/ MA yang ditandatangani Ketua Kamar Pidana MA pada 12 Maret 2021.

"Betul ada perpanjangan penahanan, tapi kami terima salinan surat penahanannya pada Senin (22/3). Jaksa yang berwenang mengembalikan keduanya ke dalam tahanan," tutur Syamsumar.

Sebelum Toto dan Fanni dikeluarkan dari tahanan, pihak Rutan Purworejo telah melakukan koordinasi dengan PN.

Namun ketika itu, belum ada informasi dilakukannya perpanjangan penahanan sesuai Pasal 29 KUHP.

Kasi Intelijen Kejari Purworejo M Arif Yunadi mengatakan, pihaknya telah menerima salinan surat perpanjangan penahanan terdak-

wa dalam bentuk fotokopi.

"Segera setelah kami terima surat asli, keduanya akan dicari untuk dilakukan penahanan kembali. Tetapi kami tetap berharap mereka mau bekerja sama dengan cara taat hukum," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Rutan II B Purworejo Mochammad Mukaffi, mengemukakan dikeluarkannya keduanya dari tahanan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Namun sebelum habis, kami kontak dengan PN dan Kejari Purworejo. Kami sama-sama bingung karena belum ada perpanjangan penahanan dai MA," ucapnya.

Dua hari setelah keduanya dikeluarkan, kata Mukaffi, Rutan Purworejo menerima salinan perpanjangan penahanan dalam bentuk file digital, di mana tertulis mulai 14 Maret 2021.

"Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, keduanya dikeluarkan sebelum kami terima informasi perpanjangan. Pada intinya, kami hanya melaksanakan perintah PP 27 tahun 1983, yakni rutan tidak boleh menerima tahanan yang tidak disertai surat penahanan sah yang dikeluarkan pejabat berwenang," tandasnya. (Jas)

DUGAAN KORUPSI KECAMATAN PURBALINGGA

Sejumlah Saksi Mulai Diperiksa Kejaksanaan

PURBALINGGA (KR) - Penyidik Kejaksanaan Negeri (Kejari) Purbalingga memeriksa empat saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di kantor Kecamatan Purbalingga, Selasa (23/3).

Empat saksi tersebut, masing-masing Kasi Pemerintahan, Keterlibatan dan Ketentraman Umum tahun 2013-2019, Kasi Kesra Agustus-Desember 2019, staf Kecamatan Purbalingga dan tenaga harian lepas di kantor Kecamatan Purbalingga.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Kecamatan Purbalingga," tutur Kasi Intel Kejari Purbalingga,

Indra Gunawan SH, Selasa (23/3) malam.

Empat saksi itu diperiksa dari pukul 9.00 hingga pukul 15.00. Jaksa penyidik mengorek keterangan terkait pengadaan barang-barang kantor dan anggaran operasional.

Sehari sebelumnya, jaksa penyidik juga telah memeriksa empat saksi lainnya, yakni Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tahun 2017 sampai 2020, Sekretaris Kecamatan Purbalingga. Bendahara Pengeluaran Kecamatan Purbalingga dan Sekretaris Kecamatan Purbalingga dari Bulan April 2018 sampai Juli 2019.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kajari Purbalingga Lalu Syaifudin SH telah menandatangani Surat

Perintah Penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kantor kecamatan Purbalingga, Jumat (12/3). Korps baju coklat itu juga sudah melakukan penyelidikan dan gelar perkara.

Dari penyelidikan yang ditindaklanjuti gelar perkara itu, penyidik menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD di kantor kecamatan Purbalingga dari 2017 hingga 2020 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 334 Juta.

Dua Senin pekan lalu, Tim Kejari melakukan pengeledahan di kantor dan rumah pribadi camat Purbalingga. Jaksa menyita sejumlah berkas terkait pengunaan anggaran dan laporan bendahara. (Rus)